

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2002, *Seri hukum Bisnis, Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Al-Azhar, Muhammad Nuh, 2012, *Digital Forensic Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek, Jakarta.

Aria Syudi dkk, 2003, Analisis Kepailitan Indonesia (Kepailitan di Negeri Pailit), PSHK, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, edisi revisi IV*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Anisah, Siti, 2008, Perlindungan dan Kepentingan Kreditur dan Debitur dalam hukum kepailitan di Indonesia, Total Media, Yogyakarta.

Dendawijaya, Lukman, 2003, *Manajemen Perbankan*, Edisi kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang.

Harahap, M. Yahya, 1981, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hoff, Jerry, 2000, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, diterjemahkan oleh Kartini Muljadi, Tatanusa, Jakarta.

Jackson, H. Thomas, 1986, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Harvard University Press. Cambridge.

Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartono, 1973, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Pradnya Paramita, Jakarta.

Mazuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prada Media Group, Jakarta.

Muljadi, Kartini, 2001, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang dan Benny Ponto, ed., Penyelesaian Utang-Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

Mulyadi, Lilik, 2013, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung

R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 1989, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 85.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1983, *Hukum Acara Perdara dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.

Siregar, Pulo, 2014, *Bebaskan Utangmu*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Sinamo, Nomoensen, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999*, Cet I, PT Temprint, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2010, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Prajagrafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum, cet 3*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soemitro, Rony Hanitijo, 1996, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Subekti, Raden, 2007, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Subhan, M. Hadi, 2008, *Hukum kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Subhan, M. Hadi, 2014. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, & Praktik Di Peradilan*, Kencana Media Group, Jakarta.

Suci, I.D.A., & Poesoko, H., 2016, *Hukum Kepailitan Kedudukan & Hak Kreditur Separatis Atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Syahrani, H. Riduan, 2004, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*,

PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Usman, Rachmadi, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT.

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Poerwadarminta, Wilfridus J. S., 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, hal.139.

Prodjodikiro, Wirjono, 1986, *Azas-Azas Hukum Perdata*, P.T. Bale, Bandung.

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Citra, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2002, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Widjaja, Gunawan, 2009, *Resiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Pailit “Dampaknya Bagi Karyawan, Debitor dan Kreditor, Penyebab Perusahaan Dinyatakan Pailit, Akibat Hukum Perusahaan yang Pailit”*, Forum Sahabat, Jakarta

Wawancara dengan Anggi Putra Kusuma, S.H., pada tanggal 11 Agustus 2018.

Wawancara dengan Romulo Silaen, S.H., M.H. pada tanggal 22 Juli 2019.

## **B. Kamus, Jurnal, Makalah, Artikel dan Hasil Seminar**

Putriyanti & Wijayanta, T., 2010, Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi, *Mimbar Hukum*,

Yogyakarta

### C. Internet

Januardo S.P. Sihombing, “Tinjauan Yuridis Hukum Kepailitan atas Kekuatan BI Checking dan Laporan Keuangan Debitor”, <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/13/tinjauan-yurisprudensi-hukum-kepailitan-atas-kekuatan-bi-checking-dan-laporan-keuangan-debitor/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018.

Kejaksanaan Republik Indonesia, “Surat Perintah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Nomor KEP-16/K.4/03/2016 tanggal 15 Maret 2016, perihal Pembentukan Tim Pengkajian dengan Topik/Judul Kekuatan Nilai Pembuktian Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Penanganan Tindak Pidana”,  
[https://kejaksaan.go.id/unit\\_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4183](https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&id=4183)  
diakses pada tanggal 12 Mei 2018.

Tim Informasi Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007 Sistem Informasi Debitu”,  
[https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi\\_091407.aspx](https://www.bi.go.id/id/peraturan/perbankan/Pages/pbi_091407.aspx) diakses pada tanggal 20 Agustus 2018.

### D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Bank Indonesia No. 9/14/PBI/2007

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)

Herzien Inlandsch Reglement (HIR)